

ABSTRAK

Ahmad Surya Nurhakim: *Implementasi Pasal 7 Huruf A Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus di Sekolah Menengah Kejuruan Bina Taruna Purwakarta*

Budaya merokok di negara kita menjadi hal yang lumrah, kemudian budaya merokok juga hingga saat ini masih menjadi masalah yang sentral di negara kita yang terus-menerus diupayakan dalam bentuk penanggulangannya. Angka ketergantungan terhadap rokok pada usia remaja masih sangat tinggi, hasil observasi yang penulis lakukan di SMK Bina Taruna Purwakarta memberi gambaran budaya perilaku merokok yang dilakukan di sekolah. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran kebijakan yang mana diatur dalam Perda Kabupaten Purwakarta No. 9 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan mengatur sekolah sebagai kawasan tanpa rokok.

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kawasan tanpa rokok di SMK Bina Taruna Purwakarta. Yang mencakup 4 unsur yaitu, (1) proses komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implmentation*, terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Kemudian data kualitatif terdiri dari data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, dokumentasi, wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) proses komunikasi sosialisasi perda kawasan tanpa rokok, diperoleh dari dinas kesehatan dan puskesmas, selanjutnya pihak sekolah menginformasikan dalam lingkungan sekolah, tidak secara langsung dari Bidang Hukum Setda Kab. Purwakarta. (2) Sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya manusia mulai dari pimpinan sekolah hingga siswa menjadi pelaksana pengawasan kawasan tanpa rokok, pengalokasian anggaran dana belum ada di sekolah. Sarana dan prasarana yang menunjang KTR seperti spanduk, stiker dan poster yang terpasang namun belum efektif, serta organisasi seperti OSIS ikut serta mengawasi kawasan tanpa rokok. (3) Disposisi yaitu dukungan dari pimpinan sekolah dan jajarannya dengan adanya tata tertib dan mematuhi aturan kawasan tanpa rokok di sekolah. Kemauan dan keinginan yaitu terbebas dari asap rokok dan menurunkan perokok, masih terdapat pelanggaran aturan dengan diberlakukannya sanksi teguran dan pemanggilan orang tua. (4) Struktur birokrasi penerapan kawasan tanpa rokok yaitu terkait pembagian wewenang dan *Standar Operating Prosedre* (SOP) belum terlaksana secara efektif. Rekomendasi kepada Pemda Kab. Purwakarta agar melakukan sosialisasi penerapan KTR sebagai pemberitahuan jelas kepada pelaksana kebijakan di sekolah.

Kata Kunci: Aturan, Implementasi, Kawasan Tanpa Rokok